

IMPLEMENTASI PROGRAM KOTAKU DALAM REVITALISASI DAERAH KUMUH DI KELURAHAN REJOMULYO KOTA SEMARANG

Rani Eliza Zethary, Hartuti Purnaweni
Departemen Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro
Jl. Prof H. Soedarto, S.H Tembalang Semarang Kotak Pos 1269
Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405
Laman : <http://fisip.undip.ac.id> email fisip@undip.ac.id

Abstrak

Pengembangan permukiman perkotaan di Indonesia terhambat oleh permasalahan permukiman kumuh. Kota Semarang menjadi salah satu wilayah di Indonesia yang berada di peringkat 8 kota terbesar dengan 43 Desa/Kelurahan dengan permukiman kumuh. Program Kotaku merupakan program pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh di Kota Semarang, penelitian ini nantinya bertujuan untuk menganalisis Implementasi Program Kotaku dalam Revitalisasi Daerah Kumuh di Kelurahan Rejomulyo Kota Semarang. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Data primer dikumpulkan melalui wawancara dengan pejabat pemerintah yang berwenang dan masyarakat setempat serta observasi lapangan, sedangkan, data sekunder dikumpulkan melalui literatur. Implementasi Program Kotaku telah diatur dalam Surat Edaran Menteri PU Nomor 40 tahun 2016 tentang Pedoman Umum Program Kotaku yang di dalamnya terdapat langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh aktor pelaksana dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program Kotaku di Kelurahan Rejomulyo sudah berjalan dengan baik namun belum ada konsistensi dalam menjalankan tahap keberlanjutannya. Direkomendasikan bahwa hasil penelitian ini dapat menjadi dorongan untuk implementasi Program Kotaku yang lebih baik lagi, sehingga dapat terus mendukung pemberantasan daerah kumuh di Indonesia, khususnya di Kota Semarang.

Kata kunci: Implementasi, daerah kumuh, Program Kotaku, berkelanjutan

Abstract

The development of Indonesian urban settlements is hampered by slum problems. Semarang City is one of the regions in Indonesia, which is ranked 8th largest city with 43 villages/neighborhoods with slums. Kotaku program is a program of prevention and improvement of the quality of slums in the city of Semarang, the research was later aimed at analyzing the implementation of the Kotaku Program in the revitalization of slums in the village Rejomulyo Semarang. The research methods used are qualitative descriptive. Primary data is collected through interviews with competent government officials and local communities as well as field observations, while secondary data is collected through literature. The implementation of the Kotaku Program has been governed by the Circular Minister of PU No. 40 of 2016 on the Kotaku Program general guidelines in which there are steps that can be performed by implementing actors and communities. The results showed that the implementation of Kotaku program in the village Rejomulyo has been running well but there is no consistency in running its sustainability stage. It is recommended that the results of this research can be a boost for the implementation of the better Kotaku Program, to continue to support the eradication of slum in Indonesia, especially in the city of Semarang.

Keywords: implementation, slum, Kotaku Program, sustainable

A. PENDAHULUAN

Kota menurut Zoe'raini Djamal Irwan (Kabupung 2012:38) merupakan sebuah sistem yaitu sistem terbuka, baik secara fisik maupun sosial ekonomi, bersifat tidak statis dan dinamis atau bersifat sementara. Kota Semarang yang merupakan kawasan perkotaan sekaligus sebagai Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan data BPS daerah, pada tahun 2014, berada di peringkat ke 8 kota terbesar berdasarkan populasi, dengan 1.527.433 penduduk, 438.537 rumah tangga, dan dengan rata-rata kepadatan penduduk berjumlah 4.087 jiwa/km². Kawasan kumuh Kota Semarang mencapai 415,83 hektar, dan wilayah tersebut tersebar di 64 kelurahan di 15 kecamatan.

Sama halnya dengan kawasan perkotaan pada umumnya, Kota Semarang memiliki permasalahan seperti banyaknya pertumbuhan penduduk. Semarang, sebagai kota besar yang banyak didatangi oleh para pendatang, menyebabkan munculnya Kampung Kota yang memiliki berbagai masalah dengan lingkungan fisik dan kondisi sosial budaya ekonomi penduduknya yang selanjutnya dapat menyebabkan munculnya pemukiman kumuh (Nursyahbani dan Pigawati, 2015). Kota

Semarang menjadi salah satu kota metropolitan di Indonesia yang memiliki banyak daerah kumuh dan menempati peringkat 1 bersama Kabupaten Kendal dalam jumlah permukiman kumuh terbanyak di Jawa Tengah yakni sebanyak 43 wilayah permukiman kumuh¹. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman, pemukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena tidak keteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.

Berdasarkan data Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2012, Kota Semarang masuk dalam 10 kota dengan kawasan kumuh di Indonesia. Salah satu kelurahan yang termasuk dalam kawasan terkumuh adalah Kelurahan Rejomulyo. Kelurahan Rejomulyo terletak di Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang. Wilayah Rejomulyo sepenuhnya berada di Kawasan Kota Lama Semarang.

Salah satu program yang dilaksanakan pemerintah dalam menangani kawasan

¹ Data BPS Provinsi Jawa Tengah 2014, www.jateng.bps.go.id

kumuh di daerah-daerah di Indonesia adalah melalui Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) yang merupakan program dari Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia. Program Kotaku adalah program pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh yang merupakan upaya strategis Pemerintah dalam rangka meningkatkan peran masyarakat dalam percepatan penanganan kawasan kumuh dan mendukung gerakan 100-0-100 di perkotaan pada tahun 2016 – 2020, dalam rangka mewujudkan permukiman yang layak huni, produktif dan berkelanjutan dengan kolaborasi sebagai platform serta masyarakat sebagai pelaku penanganan kumuh.

Dasar kebijakan Program Kotaku adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Berdasarkan kebijakan tersebut, maka dimasukkan dalam RPJMN 2015 – 2019 gerakan 100 – 0 – 100 (100% akses air minum, 0% kawasan kumuh, 100% akses sanitasi). Untuk memenuhi target 0% kawasan kumuh tersebut maka Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR membuat Program Kotaku. Implementasi Program Kotaku di daerah-daerah di Indonesia didasari oleh

Surat Edaran Kementerian PUPR Ditjen Cipta Karya No. 40 tahun 2016 tentang Pedoman Umum Kota Tanpa Kumuh. Dalam terwujudnya implementasi Program Kotaku di Kota Semarang, maka Pemerintah Kota Semarang mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Walikota Semarang No. 50 tahun 2014 tentang Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Kota Semarang.

Surat Edaran Kenterian PUPR Ditjen Cipta Karya Nomor 40 tahun 2016 tentang Pedoman Umum Program Kota Tanpa Kumuh dimaksudkan sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Program Kotaku. Tahapan penyelenggaraan program terdiri dari persiapan, perencanaan, pelaksanaan, dan keberlanjutan. Detil metode untuk masing-masing tahapan khususnya di tingkat Kelurahan dan masyarakat dibahas dalam petunjuk teknis penyelenggaraan Program Kotaku yaitu:

1. Persiapan
 - Lokakarya orientasi tingkat Kelurahan/Desa
 - Penguatan kelembagaan dan kapasitas
 - Pendampingan revitalisasi BKM untuk penajaman orientasi pada pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh
 - Kompilasi data tingkat kelurahan/desa
 - Penguatan kelembagaan dan kapasitas

- Pengumpulan data primer
- 2. Perencanaan
 - Penyusunan RPLP dan DED
 - Penyusunan AB dan rencana operasional
 - Penguatan kapasitas
 - Penyusunan proposal kegiatan
 - Penguatan kapasitas
- 3. Pelaksanaan
 - Pelaksanaan kegiatan
 - Penguatan kapasitas
 - Koordinasi program prioritas dan penganggaran
- 4. Keberlanjutan
 - Penerapan AB pencegahan kumuh dan operasional
 - Penguatan kapasitas

Seperti di Kelurahan Pesisir Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru, keterlibatan masyarakat dikatakan optimal karena keterlibatan masyarakat sudah menyeluruh dalam memanfaatkan hasil dari program yang dilaksanakan. Namun, tetap ada rendahnya kesadaran, pemahaman, dan adanya kegiatan lain yang dilakukan oleh masyarakat yang menyebabkan kurangnya partisipasi dan memberikan manfaat bagi Kelurahan Pesisir itu sendiri.

Pengimplementasian Program Kotaku di Kelurahan Rejomulyo Kota Semarang, menunjukkan bahwa pemerintah telah melaksanakan revitalisasi di lingkungan tersebut, karena pemerintah berusaha meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di kawasan kumuh perkotaan untuk mendukung terwujudnya

permukiman perkotaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan. Penetapan Kelurahan Rejomulyo sebagai kawasan kumuh Kota Semarang diatur dan ditetapkan dalam SK Walikota Semarang Nomor 50 tahun 2014 tentang Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Kota Semarang.

Penetapan tersebut didasari alasan bahwa, Kelurahan Rejomulyo memiliki permasalahan yang cukup kompleks dalam hal infrastruktur berdasarkan profil Kotaku Kota Semarang tahun 2017 antara lain; 24% bangunan hunian tidak memiliki keteraturan, 17% bangunan hunian memiliki kondisi atap, lantai, dinding tidak sesuai dengan persyaratan teknis, 22% kawasan permukiman tidak terlayani jaringan jalan lingkungan yang memadai, 3% kondisi drainase di permukiman memiliki kualitas buruk, 0% masyarakat tidak terpenuhi kebutuhan minimal air (mandi, minum, cuci), 29% bangunan hunian tidak memiliki kloset yang terhubung dengan *septic tank*, 100% saluran pembuangan air limbah rumah tangga tercampur dengan drainase lingkungan, 19% sampah domestik terangkut ke TPS/TPA kurang dari 2 minggu, dan 52% kawasan permukiman tidak memiliki ketersediaan prasarana/sarana proteksi kebakaran.

Dilihat dari permasalahan tersebut, Program Kotaku menggunakan pendekatan antara Pembangunan Infrastruktur Berbasis Masyarakat, Penguatan Peran Pemerintah Daerah sebagai Nahkoda dan kerjasama antara Pemerintah Daerah dan pihak swasta terkait dalam Implementasi Program Kotaku di Kelurahan Rejomulyo Kota Semarang. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis implementasi program Kotaku dalam revitalisasi daerah kumuh di Kelurahan Rejomulyo Kota Semarang dan factor apa saja yang mempengaruhinya.

B. KAJIAN TEORI

Kebijakan Publik

Menurut Winarno (2007), istilah "kebijakan" atau "*policy*" digunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun suatu lembaga pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Terdapat proses dan tahapan yang cukup panjang dalam kebijakan publik. Islamy mengemukakan (Suwitri, 2008) bahwa kebijakan publik sebagai proses yang diawali dengan perumusan kebijakan, kemudian berlanjut pada pelaksanaan kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Sehingga, kebijakan publik dapat dikatakan sebagai

peraturan atau program yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatasi masalah yang ada di masyarakat dan diharapkan dapat memberikan dampak yang baik bagi masyarakat melalui proses formulasi kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan.

Implementasi Kebijakan Publik

Winarno (2007:144) mengatakan, implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Dalam konsep implementasi kebijakan, implementasi kebijakan merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang. Implementasi secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerjasama untuk untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program. Implementasi pada sisi lain merupakan fenomena yang kompleks yang dapat dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran (*output*) maupun sebagai suatu dampak (*outcome*).

Model Implementasi

a) Model Implementasi Kebijakan Publik

Donald Van Metter dan Carl Van Horn

Model pendekatan *top-down* yang dirumuskan oleh Donald Van Metter dan Carl Van Horn disebut dengan *A Model of The Policy Implementation*. Proses implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau performansi suatu implementasi kebijakan yang pada dasarnya sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan berbagai variabel (Agustino, 2014:141). Ada enam variable meliputi: (1) *Ukuran dan Tujuan Kebijakan*, (2) *Sumber daya*, (3) *Karakteristik Agen Pelaksana*, (4) *Sikap/Kecenderungan (Disposition) para Pelaksana*, (5) *Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Pelaksana*, dan (6) *Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik*.

b) Implementasi Kebijakan Model

George C. Edwards

Ada empat variabel yang mempengaruhi dalam implementasi kebijakan (Subarsono, 2013) meliputi: (1) Komunikasi, (2) Sumber Daya, (3) Disposisi, dan (4) Struktur Birokrasi.

Revitalisasi

Menurut Danisworo (2002), revitalisasi adalah upaya memvitalkan kembali suatu kawasan atau bagian kota yang dulunya pernah vital/hidup akan tetapi mengalami kemunduran dan degradasi. Revitalisasi terjadi melalui beberapa tahapan dan membutuhkan kurun waktu tertentu serta meliputi hal-hal sebagai berikut (Prihatno, 2016):

- 1) *Intervensi fisik*
- 2) *Rehabilitas ekonomi*
- 3) *Revitalisasi sosial*.

Daerah Kumuh (Slum Area)

Menurut Rahmawati (2012) (Togobu et al. 2014), permukiman penduduk yang sangat padat memberikan peluang atau penyebab kondisi lingkungan kota menjadi buruk. Menurut Waston Malau (2013), permukiman kumuh (*slum area*) adalah daerah yang sifatnya kumuh tidak beraturan yang terdapat di daerah perkotaan.

Pada umumnya kondisi permukiman kumuh menghadapi permasalahan antara lain : (1) luas bangunan yang sangat sempit dengan kondisi yang tidak memenuhi standar kesehatan dan kehidupan social, (2) kondisi bangunan rumah yang salingberhimpitan sehingga rentanterhadap bahaya kebakaran, (3) kurangnya air bersih,

(4) jaringan listrik yang ruwet dan tidak mencukupi, (5) drainase yang sangat buruk, (6) jalan lingkungan yang buruk, (7) ketersediaan sarana MCK yang sangat terbatas. (Pedum NUSSP, 2006) (dalam Kadir, 2010).

C. METODELOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dimana peneliti mencoba menjelaskan dan menganalisa Implementasi Program Kotaku dalam revitalisasi daerah kumuh. Lokus penelitian ini terdapat di Kelurahan Rejomulyo, Semarang. Subjek penelitian atau responden dalam penelitian ini terdiri dari: Kepala Koordinator Kota Program Kotaku Kota Semarang, Kepala Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Kota Semarang, dan Masyarakat Kelurahan Rejomulyo. Teknik pengambilan data atau sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan *purposive sampling*. Sumber data dalam penelitian ini adalah Data Primer yang diperoleh dengan mendatangi Kelurahan Rejomulyo Kota Semarang sebagai lokus penelitian kemudian melakukan wawancara dengan informan yang sudah ditemukan Data Sekunder, dengan teknik pengumpulan data: Observasi, Wawancara, Dokumentasi, Studi Pustaka. Di dalam penelitian ini teknik analisis dan interpretasi data yang digunakan

dalam proses pengolahan data yaitu bergerak di antara reduksi data, penyajian dan penarikan kesimpulan/verifikasi dengan teknik triangulasi.

D. PEMBAHASAN

1. Implementasi Program *Kotaku* dalam Revitalisasi Daerah Kumuh di Kelurahan Rejomulyo Kota Semarang

Pelaksanaan Program Kotaku berdasarakan SE Menteri PU Nomor 40 tahun 2016 tentang Pedoman Umum Program Kota Tanpa Kumuh, terdapat 4 tahapan yang harus dilakukan oleh aktor pelaksana untuk mengimplementasikan program Kotaku sesuai dengan petunjuk pelaksanaannya dalam Surat Edaran tersebut, yaitu:

- 1) **Persiapan**, Tahap perencanaan program Kotaku meliputi 2
 - a. Sosialisasi, Sosialisasi yang dilaksanakan oleh Korkot dan BKM selaku aktor pelaksana memberikan pemahaman kepada seluruh lapisan masyarakat bahwa program ini juga harus melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat. Setelah sosialisasi awal diadakan bersama dengan para tokoh masyarakat, barulah dilaksanakan sosialisasi kepada masyarakat umum selaku warga yang tinggal di wilayah yang terkena program tersebut. Saat sosialisasi di masyarakat umum, tim

fasilitator dari karkot dan BKM melaksanakan perkumpulan yang diadakan kurang lebih sebulan sekali untuk memberitahukan pada warga bahwa ada dana yang datang dari pemerintah untuk merevitalisasi infrastruktur di daerah tersebut.

- b. Komitmen para pemangku kepentingan, BKM melaksanakan tugasnya dimulai dari berkoordinasi dengan Karkot, koordinasi dan sosialisasi dengan masyarakat, dan sampai dengan tahap pelaksanaan dan juga monitoring setelah berjalannya program. BKM mengikuti alur yang sudah ditetapkan oleh Karkot. Para aktor pelaksana selaku pemangku kepentingan cukup berkomitmen dalam pelaksanaan program ini dan melaksanakan tugasnya sesuai dengan porsi dan tugasnya masing-masing.

2) Perencanaan

Tahap perencanaan tersebut dilaksanakan oleh para aktor pelaksana sesuai dengan SE Menteri PU Nomor 40 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Program Kotaku. Perencanaan telah dilaksanakan secara detil yang diawali dengan penyusunan RPLP (Rencana Penataan Lingkungan Permukiman) Kelurahan Rejomulyo yang berisi tentang

rencana pola ruang, rencana pengembangan wilayah, rencana penanganan pemukiman kumuh, dan rencana penanganan ekonomi sosial. Setelah itu, prioritas kegiatan lingkungan akan di buatkan DED (Detailed Engineering Design) yang akan dipresentasikan kepada masyarakat di wilayah yang akan mendapatkan program. Selanjutnya, setelah perencanaan selesai dan ada dana dari APBD maka program akan langsung dilaksanakan. Jika dana dari APBD tidak tersedia maka akan langsung diberikan kepada pihak swasta ataupun CSR yang ingin ikut berkontribusi dalam pelaksanaan program ini.

3) Pelaksanaan

Pelaksanaan Program Kotaku di Kelurahan Rejomulyo terfokuskan pada keadaan lingkungan yang baik dan bersih. Tahap pelaksanaan ini baik kegiatan sosial, kegiatan ekonomi maupun kegiatan infrastruktur ini dilaksanakan di Kelurahan Rejomulyo sesuai dengan perencanaan yang telah disusun dalam dokumen rencana penanganan pemukiman kumuh. Kegiatan yang dilaksanakan merupakan kegiatan prioritas penanganan baik skala kota maupun skala lingkungan yang sudah dikoordinasikan

bersama sebelumnya. Selain dari 7 aspek kekumuhan yaitu bangunan gedung, jalan lingkungan, drainase, air bersih, pengelolaan sampah, pengelolaan air limbah, pengamanan kebakaran, terdapat aspek lain yang ditambahkan yaitu adanya ruang terbuka publik. Ruang terbuka publik tersebut dibangun dalam bentuk taman terbuka untuk masyarakat di RW 6. Lokasi taman tersebut yang dimana dulunya merupakan pasar ayam dan sayuran yang tidak memiliki saluran pembuangan dengan baik, namun direvitalisasi menjadi taman. Pelaksananya sudah dijalankan dengan baik dan sudah cukup dirasakan dampak dan manfaatnya oleh masyarakat Kelurahan Rejomulyo khususnya di RW 6 yang memiliki tingkat kekumuhan paling tinggi. Pelaksanaan program Kotaku yang di laksanakan di Kelurahan Rejomulyo dengan penataan lingkungan ini menjadikan Kelurahan Rejomulyo, khususnya di RW 6 ini sebagai kawasan bebas kumuh melalui menciptakan lingkungan yang bersih, indah dan aman serta dapat berkelanjutan.

4) Keberlanjutan

Para aktor pelaksana sudah melaksanakan tahap keberlanjutan dan *monitoring* dengan baik hingga saat ini.

Salah satu adanya keberlanjutan dalam pelaksanaan sumur artesis dirasakan sangat berguna dan bermanfaat hingga saat ini bagi masyarakat di Kelurahan Rejomulyo, khususnya di RW 3, RW 4, dan RW 5 yang memiliki tingkat kekumuhan tertinggi di Kelurahan Rejomulyo. Harga air dari sumur artesis ini juga lebih mudah dijangkau oleh masyarakat. Pelaksanaan sumur artesis ini berjalan dengan baik. Sumber pemasukan dan dana yang didapatkan dari sumur artesis ini dimanfaatkan untuk kepentingan warga juga. Namun, tahap keberlanjutan belum merata di semua wilayah dan aspek yang direvitalisasi di Kelurahan Rejomulyo. Sangat berbanding terbalik dengan yang diungkapkan oleh warga dimana pembenahan yang dilakukan di taman terbuka hijau hanya dilakukan pada saat awal waktu selesai pengerjaan saja, namun tidak dilakukan hingga saat ini dikarenakan tidak dibiayai lagi. Padahal warga berharap taman tersebut bisa digunakan kembali untuk tempat berkumpul maupun berjualan agar dapat membantu meningkatkan perekonomian warga di Kelurahan Rejomulyo khususnya di RW 6.

2. Faktor Pendukung Dan Penghambat Program Kotaku Dalam Revitalisasi Daerah Kumuh Di Kelurahan Rejomulyo Kota Semarang

1) Sumberdaya

Peran Korkot selaku fasilitator dan pendamping, serta BKM selaku pimpinan kolektif dari masyarakat, dan kontribusi dari masyarakat itu sendiri sangat penting dalam mengkoordinasikan pelaksanaan program Kotaku di Kelurahan Rejomulyo Kota Semarang. Koordinasi yang dibangun antar aktor pelaksana sudah terjalin dengan baik. Namun, tetap terjadi kendala dalam hal pendanaan karena proposal yang sering kali persetujuannya terlambat sehingga pelaksanaannya terlambat pula sehingga penyerapannya tidak maksimal.

2) Disposisi

Respon dan tanggapan serta sikap para aktor pelaksana dalam pelaksanaan program ini sudah berjalan dengan baik. Selain itu kejujuran serta komitmen antara Korkot, BKM Kelurahan Rejomulyo, dan masyarakat sudah terjalin dengan baik. Dalam pelaksanaan program ini, BKM tetap bertugas memantau apakah masih mengikuti aturan atau tidak. Jika ada suatu wilayah yang melanggar, maka akan ditegur langsung oleh fasilitator dari Korkot, setelah itu akan mendapatkan hukuman yaitu seperti dana yang telah

diberikan akan dikembalikan dan proses pelaksanaannya berhenti. BKM sendiri pun tetap dipantau oleh fasilitator selaku pendamping dari Korkot. Selain itu, kerja sama yang baik diberikan oleh masyarakat sudah berperan dalam pelaksanaan kegiatan yaitu berupa antusiasme dalam memberikan swadaya dalam bentuk konsumsi seperti makanan dan minuman yang telah terjadwal.

3) Komunikasi

Komunikasi yang dijalankan dalam pelaksanaan program Kotaku di Kelurahan Rejomulyo yaitu dalam hal metode sosialisasi, kejelasan dan konsistensi dalam sosialisasi kepada masyarakat sudah berjalan dengan baik. Namun, tetap ada kendala yang berasal dari masyarakat itu sendiri yang terkadang susah untuk diajak bediskusi dan berkomunikasi. Dalam suatu proses pelaksanaan program tentu ada kendalanya. Tidak terlepas dari kendala dalam proses komunikasinya. Kendala yang didapatkan oleh pelaksana dalam keberjalanan program ini adalah terkadang ada wilayah yang susah mendapatkan persetujuannya. Seperti di RW 5 yang dimana pimpinan RWnya sempat tidak mau dan tidak memberikan izin. Namun, akhirnya bisa dan mau bekerja sama

setelah diajak bediskusi dan berkomunikasi dengan cara lebih baik.

4) **Karakteristik Birokrasi**

Pelaksanaan program Kotaku yang dilaksanakan oleh Korkot dan BKM Kelurahan Rejomulyo sudah dijalankan dengan baik dan sesuai dengan aturan dan SOP yang ada. Pelaksanaan program Kotaku tentunya terdapat *reward* dan *punishment* yang didapatkan oleh Korkot dan BKM sebagai aktor pelaksana. Dana yang datang dari SMF untuk merevitalisasi bangunan rumah warga yang bersifat milik pribadi merupakan *reward* yang didapatkan oleh Korkot dan BKM. Hal tersebut dikarenakan BKM Rejomulyo terkenal dengan pelayanannya yang bagus dan baik. Banyak yang merekomendasikan Kelurahan Rejomulyo sebagai tempat kunjungan ataupun percontohan wilayah yang pelaksanaan revitalisasinya berhasil. Selain itu, dana yang diberikan untuk *showcase* di tahun 2018 di RW 6 juga merupakan salah satu bentuk *reward* yang diterima oleh Kelurahan Rejomulyo.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Implementasi Program Kotaku dalam revitalisasi daerah kumuh di Kelurahan Rejomulyo Kota Semarang, dari hasil

penelitian sudah berjalan dengan baik. Hal ini dilihat dari tahap persiapan yang dilakukan secara bertahap dan rutin oleh Korkot dan BKM diimbangi dengan komitmen pemangku kepentingan yang melaksanakan tugas yang telah sesuai dengan porsi masing – masing. Selanjutnya adalah tahap perencanaan yang dilaksanakan secara detail mulai dari penyusunan Rencana Penataan Lingkungan Permukiman, hingga penanganan social yang kemudian prioritas kegiatan akan dibuatkan Detailed Engineering Design (DED). Tahap pelaksanaan yang dijalankan cukup dirasakan dampak dan manfaatnya oleh masyarakat Kelurahan Rejomulyo khususnya di RW 6 yang memiliki tingkat kekumuhan paling tinggi, dan yang terakhir adalah tahap keberlanjutan dilaksanakan dengan monitoring, terdapat perbedaan pendapat antara pemerintah dan masyarakat, dimana pemerintah yang diwakili oleh para pelaksana program mengatakan bahwa keberlanjutan program ini sudah berjalan dengan baik, akan tetapi masyarakat mengatakan bahwa keberlanjutan program masih tidak jelas karena tidak adanya dana. Adapun factor yang mempengaruhi program ini adalah:

1) Faktor Pendukung

- a. Sumber Daya Manusia yang memadai, terlihat dari peran karkot selaku fasilitator dan pendamping serta BKM yang sudah dijalankan dengan baik dan partisipasi masyarakat yang cukup tinggi.
- b. Disposisi yang berjalan baik, hal ini dilihat dari respon tanggapan serta sikap actor pelaksana yang baik, selain itu kejujuran dan komitmen antar actor terjalin dengan baik.
- c. Komunikasi yang terjalin dengan baik karena adanya kejelasan dan konsistensi dalam sosialisasi.
- d. Karakteristik Birokrasi yang sudah cukup baik, dilihat dari pelaksanaan program Kotaku yang dilaksanakan oleh Karkot dan BKM Kelurahan Rejomulyo sudah dijalankan dengan baik dan sesuai dengan aturan dan SOP yang ada.

2) Faktor Penghambat

- a. Anggaran dan persetujuan yang terlambat
- b. Pola pikir masyarakat yang terkadang sulit menerima dan sulit memberikan izin

2. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diberikan beberapa rekomendasi yang dapat meningkatkan Implementasi Program Kotaku dalam Revitalisasi Daerah Kumuh di Kelurahan Rejomulyo Kota Semarang, yaitu Karkot Kotaku Kota Semarang dan BKM Kelurahan Rejomulyo selaku pelaksana dalam program ini harus lebih memperhatikan keberlanjutan dalam membenahan dan pengalokasian dana terkait membenahan khususnya di taman terbuka publik di RW 6, memberikan sosialisasi dan pemahaman kepada masyarakat bahwa program Kotaku merupakan program yang bergerak di bidang infrastruktur bersama, bukan bantuan di bidang peningkatan ekonomi, serta memberikan sosialisasi agar pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk lebih peka dan mengetahui permasalahan apa saja yang terjadi lingkungan mereka masing-masing.

F. DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal:

Agustino, Leo. 2014. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Jakarta: Media Pressindo

Subarsono. 2013. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Suwitri, Sri. 2008. *Konsep Dasar Kebijakan Publik*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro

Kadir, Ishak. 2010. *Studi Karakteristik dan Pola Penanganan Kawasan Kumuh Kota Bau-Bau*. Jurnal Vol.8, No.2. Bau-Bau: Fakultas Teknik, Universitas Haluoleo.

Malau, Waston. 2013. *Dampak Urbanisasi Terhadap Pemukiman Kumuh (Slum Area) Di Daerah Perkotaan*. Jurnal Vol.5, No.2. Medan: Universitas Negeri Medan.

SF Kabupung. 2012. *Teori dan Citra Kota*. Jurnal Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Pigawati, Bitta. Nursyahbani, Raisya. 2015. *Kajian Karakteristik Kawasan Pemukiman Kumuh Kota (Studi Kasus: Kampung Gandekan Semarang)*. Jurnal Tenik PWK Vol.4 No.2. Semarang: Universitas Diponegoro.

Prihatno. 2016. *Kajian Revitalisasi Pasar Plere Kabupaten Bantul*. Jurnal Media Wisata, Vol. 14, No. 2

Nawawi, Hadari. 2005. *Penelitian Terapan*. Yogyakarta: gadjah Mada University Press.

Irvan, Hafdzita. 2018. *Partisipasi Masyarakat dalam Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) di Kelurahan Pesisir Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru*. Jurnal Vol. 5 No. 1. Pekanbaru: universitas Riau.

Dokumen:

Badan Pusat Statistik data Desa/Kelurahan yang Memiliki Permukiman Kumuh menurut Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014

Booklet Profil Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah

Modul Bahan Bacaan Pelaksanaan Kotaku Tingkat Kelurahan tahun 2016

Regulasi:

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 494 Tahun 2005 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Perkotaan (KSNP Kota).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman Pasal 1 ayat (13)

<http://www.pu.go.id/> (diakses pada 5 Desember 2017)

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/PRT/M/2016 tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

<http://kotaku.pu.go.id> (diakses pada 5 Desember 2017)

<http://jateng.bps.go.id> (diakses pada 5 Desember 2017)

rahmawatihusein.staff.umy.ac.id (diakses pada 10 Desember 2017)

Surat Edaran Kementerian PUPR Ditjen Cipta Karya No. 40 tahun 2016 tentang Pedoman Umum Kota Tanpa Kumuh (Kotaku).

http://mapgeo.id:8826/umum/detail_kondisi_geo/18 (diakses pada April 2019)

<http://bpbd.semarangkota.go.id/pages/sekil-as-bpbd-kota-semarang> (diakses pada April 2019)

Internet:

<http://file.upi.edu> (diakses pada Juni 2019)